

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Porter, strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan bernilai atau berharga yang dapat dilakukan dengan serangkaian aktivitas meliputi tiga posisi strategik dalam perusahaan, yaitu pemilihan produk tertentu yang unggul, pemenuhan target pasar, konfigurasi aktivitas bisnis.¹ Pengertian umum strategi yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara Pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh para konsumen untuk di masa depan. Dengan strategi ini maka ada yang hampir dimulai dari apa yang selalu untuk bisa terjadi dan bukan yang dimulai dari apa yang terjadi. Dengan terjadinya ada suatu kecepatan berinovasi pada pasar yang baru dan juga perubahan-perubahan pola konsumen yang sangat memerlukan *kemampuan* inti maka hendaknya perusahaan perlu untuk mencari dan mengambil kemampuan inti atau juga kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.²

¹ Nanang Fattah, *Manajemen Stratejik Berbasis Nilai*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, 30

² Taufiqurokhman, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016, 15

Pada literatur lain, disebutkan pula strategi menurut Umar Husen. Menurutnya, tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi bukan dimulai dari apa yang terjadi.³ Kemudian, manajemen strategi dalam perspektif Islam, menurut Fontaine dan Ahmad sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar yaitu penggunaan pinjaman berbasis bunga untuk membiayai entitas, pengembangan organisasi untuk berkelanjutan dalam jangka panjang, penerapan perilaku individu dalam organisasi, dan konflik antara kepentingan individu versus kepentingan seluruh organisasi.⁴

2. Komponen Strategi

a) Kompetensi yang berbeda

Merupakan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dimana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

b) Ruang Lingkup

Merupakan lingkungan dimana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas.

c) Distribusi Sumber Daya

³ Iqbal Fauzi, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Ud. Genteng Pres Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto, 2018, 9

⁴ Ahmad Saipudin, dkk, *Strategi Pengembangan LKMS (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)*, Al-Muzara'ah Vol5. No 1, 2017, 24

Merupakan bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan.⁵

3. Jenis Strategi

Menurut Griffin, secara umum strategi dibagi menjadi dua jenis dilihat dari tingkatannya. Pertama adalah strategi tingkat perusahaan. Strategi ini dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan antar perusahaan dalam sector bisnis. Kedua, strategi tingkat bisnis. Strategi ini adalah alternatif strategi yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan bisnis yang dijalankan pada beberapa jenis bisnis yang dilakukan. Berbeda dengan Griffin, Freeman dan Gilbert menambahkan kedua jenis strategi di atas dengan tingkatan strategi Ketiga, yaitu strategi pada tingkat fungsional. Strategi ini diserupakan dengan iklan pada Sunsilk dan Pantene (yang seolah-olah saling berganti balasan) menunjukkan kedua perusahaan tersebut melakukan strategi pada bagian pemasarannya, khususnya di tingkat periklanannya.⁶

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian LKMS

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara

⁵ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenada Media, 2005, 133

⁶ *Ibid*, 134

umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan secara khusus LKM bertujuan :1). Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini. 2). Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat. 3). Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi. Sifat usaha LKMS yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan LKMS dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Dari sinilah LKMS akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lainnya. Sedangkan aspek sosial LKMS berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.⁷

2. Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:⁸

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan padaprinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

⁷ Aam S. Rusdyana, dkk, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia : Pendekatan Matriks IFAS EFAS*, Ekonomi Islam, Vo. 9, No. 1 , November, 2018, 52

⁸ *Ibid*, 54

- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap

C. Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah

1. *Pengertian Peningkatan*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan menungkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi, peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan ketrampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

Menurut Salma, peningkatan inklusi keuangan akan dapat membantu mengurangi pertumbuhan kredit dari lembaga keuangan informal (seperti rentenir) yang cenderung eksploitatif sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, namun inklusi keuangan juga dapat memberikan dampak positif bagi transmisi kebijakan moneter suatu negara karena dapat meningkatkan jumlah lembaga keuangan formal.⁹

2. *Pengertian Keuangan Inklusif*

Keuangan inklusif (financial inclusion) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya mengurangi kemiskinan. Pentingnya inklusi keuangan ini dilihat dari fakta dimana tidak semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan disaat yang sama pula setiap penduduk harus memenuhi kebutuhan

⁹ Tri Buana Retno Dewi, *Dampak Inklusi Keuangan (Financial Inclusion) terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017, 17

hidupnya. Pertumbuhan yang inklusif didasari oleh tiga komponen penting yaitu keberhasilan memaksimalkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan.¹⁰

3. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

a) Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

b) Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

c) Tepat sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.

d) Berkelanjutan

¹⁰ Dian Adrian dan IGsti Bgs Wiksuana, *Inklusi Keuangan dalam Hubungan dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 12, 2018

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.¹¹

4. Unsur – unsur Inklusi Keuangan

Beberapa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas.¹²

a) Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkaubai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh perluasan akses keuangan antara lain:

(a) Penambahan jaringan kantor;

(b) Penambahan jumlah agen;

(c) Penambahan jumlah ATM;

(d) Penambahan point of access melalui layanan digital;

(e) Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (branchless);

(f) Penambahan kerja sama dengan pihak lain; dan

(g) Pengembangan delivery channel atau saluran distribusi produk dan layanan jasa keuangan.

b) Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu

¹¹ OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, 80

¹² *Ibid*, 11

memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.

- c) Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
- d) Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.*

5. Visi dan Misi Keuangan Inklusif

- a) Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan sebagai berikut:*

Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia

b) *Visi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:*

Tujuan 1: Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

Tujuan 2: Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.

Tujuan 3: Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.

Tujuan 4: Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa

masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.

Tujuan 5: Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Tujuan 6: Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.¹³

¹³ Strategi Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Revisit 2017, *Ibid*, 13